

Kerahkan Linmas Jaga Depo

■ Pemkot Mulai Bersihkan Gunungan Sampah di Kotabaru

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya mulai mengeksekusi pembersihan gunungan limbah yang menumpuk di Depo Kotabaru, yang berlokasi utara Gedung RRI Yogya. Namun, Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogya, Ahmad Haryoko, mengatakan, karena keterbatasan kuota, eksekusi harus dilakukan secara bertahap.

"Kuota baik di pengolahan dan di lainnya tidak bisa langsung seperti di TPA. Jadi, ya kita cicil, tapi kita usahakan bisa selesai dalam waktu satu minggu ini," katanya, Jumat (8/11).

Ia pun mengungkapkan, tumpukan sampah yang menyentuh 20-30 ton tersebut, kondisinya sekarang sudah jauh berkurang dibanding sebelumnya. Haryoko tidak menungkiri, sampah menggunung karena minimnya pengawasan di Depo Kotabaru, yang selama ini hanya dilakukan pada siang hari.

"Sekarang mulai dilakukan penjagaan di malam hari oleh linmas. Jadi, otomatis kalau *enggak* dijaga itu para pembuang yang *enggak* mau tertib dengan jadwal kita, mereka masuk di malam hari," ujarnya.

Dijelaskan, jadwal pembuangan di Depo Kotabaru selaras dengan depo-depo lain di Kota Yogya, sehingga masyarakat yang hendak melakukan pembuangan harus tertib mentaatinya. Meski demikian, Haryoko menyebut, pelanggaran jam pembuangan kemungkinan didominasi oleh warga yang tinggal di luar seputaran Kotabaru.

"Ada indikasi bukan warga Kotabaru, warga yang

EKSEKUSI BERTAHAP

- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya mulai mengeksekusi pembersihan gunungan limbah yang menumpuk di Depo Kotabaru, secara bertahap.
- Tumpukan sampah sebelumnya menyentuh sekitar 20-30 ton dan sudah banyak dikeluhkan masyarakat terkait aroma tak sedap.
- Pengawasan di depo itu juga akan dilakukan lebih ketat, untuk mencegah warga membuang sampah di luar jadwal.

lain di luar Kotabaru pasti ada itu," cetusnya.

Sebagai informasi, Depo Kotabaru sejatinya sempat dinormalisasi jelang puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Yogya pada 7 Oktober 2024 lalu. Namun, beberapa pekan setelahnya, aktivitas pembuangan kembali tidak terkontrol, sehingga gunungan sampah seketika timbul lagi.

"Banyak pembuang yang tidak mematuhi jam buang sampah, karena deponya memang belum ada penjaan," tandasnya.

Haryoko pun tidak nampak, tumpukan limbah di Depo Kotabaru salah satunya disebabkan oleh minimnya pengawasan dari petugas. Padahal, Pemkot Yogya sudah menetapkan jadwal pembuangan di depo, untuk menekan alokasi sampah dari warga masya-

rakat.

Warga terganggu

Fenomena gunungan limbah di Depo Kotabaru dikeluhkan masyarakat yang sehari-harinya melintas atau beraktivitas di kawasan tersebut. Parwanto, yang lokasi kerjanya tidak jauh dari Depo Kotabaru, merasakan langsung dampak tumpukan sampah yang tidak kunjung diangkut. Ia menyebut, aroma tak sedap khas sampah yang sudah lama mengendap mulai muncul dan seringkali terbawa angin hingga ruang kerjanya.

"Apalagi sekarang semakin sering turun hujan ya. Baunya pun semakin parah, karena sampahnya jadi basah kan," tandasnya.

Ia berharap, pemerintah segera mengambil tindakan, karena Kotabaru merupakan kawasan *heritage* yang sarat aktivitas publik, maupun wisatawan. Jika dibiarkan, Parwanto khawatir, timbulan air lindi dan gerombolan tikus yang mulai menyerbu Depo Kotabaru, berdampak terhadap kesehatan.

"Semoga secepatnya bisa ditangani, karena di sekitar depo kan ada tempat ibadah, perkantoran, bahkan perguruan tinggi juga," cetusnya.

Selain itu, berdasar pengamatannya, tumpukan limbah yang melebar hingga lebih kurang 30 meter dari depo tersebut, mulai mengganggu akses jalan. Menurutny, banyak pengendara yang memilih putar balik, karena tidak tahan dengan aroma sampah ketika melintasi Depo Kotabaru. **(aka)**



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

KAWAL - Suasana pertemuan Aliansi Advokat Demokrasi Bersih dan Berbudaya dengan Bawaslu Kota Yogya, Jumat (8/11).

Aliansi Advokat Desak Penanganan Dugaan Pelanggaran Kampanye

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah advokat atau *lawyer* yang tergabung dalam Aliansi Advokat Demokrasi Bersih dan Berbudaya, menyambangi Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta, Jumat (8/11). Mereka datang untuk mengawal langkah Bawaslu, dalam menindaklanjuti dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye Pilkada Kota Yogya 2024.

Koordinator Aliansi Advokat Demokrasi Bersih dan Berbudaya, Arfian Indrianto, mengatakan, salah satu yang jadi sorotannya adalah dugaan *money politics* atau politik uang oleh salah satu pasangan calon (paslon) peserta pilkada. Berdasar pemberitaan dari beberapa media tempo hari, ia menyebut, ada laporan praktik bagi-bagi minyak goreng kemasan oleh salah satu paslon di wilayah Umbulharjo.

"Informasi yang kami dapat dari media, dugaan itu kan dilakukan

oleh paslon 03. Bawaslu harus berkomitmen menindaklanjuti," tegasnya.

Dalam kesempatan tatap muka dengan Bawaslu itu, pihaknya pun sekaligus menyampaikan ide-ide untuk menciptakan sistem demokrasi yang bersih dan berbudaya. Menurut Arfian, aliansinya akan terus mengawal ketugasan Bawaslu, dalam menindak seluruh dugaan pelanggaran Pilkada Kota Yogya 2024.

"Tapi, sejauh ini kami mengapresiasi Bawaslu yang sudah menjalankan ketugasannya dengan baik, sesuai koridor yang berlaku," cetusnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogya, Jantan Putra Bangsa, mengatakan, bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Terhitung sejak laporan masuk, Rabu (6/11) lalu, Bawaslu memiliki waktu dua hari untuk me-

lakukan kajian awal, serta penelitian berkas.

"Kalau bisa teregistrasi, kami memiliki waktu tiga hari untuk melakukan penanganan, plus dua hari jika dibutuhkan. Dalam penindakan, kami juga harus melibatkan Gakkumdu, yang di dalamnya ada unsur kejaksaan dan kepolisian," ungkapny.

Sebelumnya, Tim Pemenangan 03, Saleh Tjan, mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak pernah menggelar kegiatan yang dibarengi dengan aksi bagi-bagi sembako, termasuk minyak goreng. Namun, ia pun tidak permasalahan laporan warga ke Bawaslu tersebut, sekaligus menegaskan ke-siapan jika dimintai penjelasan.

"Kami siap menjelaskan. Akan kami klarifikasi, bahwa tim 03 tidak pernah melakukan hal tersebut. Kami tidak pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan," tandasnya. **(aka)**

Penguatan Kapasitas Masyarakat Jadi Kunci Mitigasi Bencana

YOGYA, TRIBUN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana dengan mengutamakan penguatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Noviar Rahmad, menjelaskan bahwa sebagai bagian upaya penyelamatan saat bencana justru datang dari masyarakat itu sendiri.

"Dari hasil survei, ditemukan bahwa 34 persen penyelamatan ketika bencana terjadi dilakukan oleh diri sendiri, 32 persen oleh keluarga, dan 32 persen oleh lingkungan sekitar. Sementara itu, peran pemerintah hanya sekitar lima persen," ungkap Noviar, Jumat (8/11), sembari menekankan pentingnya kesadaran dan kesiapsiagaan individu serta komunitas.

Dalam hal ini, BPBD DIY fokus pada peningkatan kemampuan masyarakat, terutama untuk melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, orang tua, wanita, dan penyandang disabilitas. "Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, terutama yang berada dalam kondisi rentan," tegasnya.

Selain itu, Noviar juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana dan berperan aktif dalam mitigasi bencana secara mandiri. "Masyara-

kat harus sadar akan potensi risiko yang ada di sekitar mereka, seperti tidak membuang sampah di sungai yang dapat menyebabkan banjir, atau tidak mendirikan bangunan di daerah rawan bencana," katanya.

BPBD DIY juga mendorong agar masyarakat lebih intensif melakukan simulasi dan persiapan. Dengan adanya peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, seperti prediksi hujan lebat yang dapat memicu bencana, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi situasi darurat.

"Kami sudah dapat informasi mengenai potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, yang dapat menimbulkan bencana seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, masyarakat perlu melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat," lanjut Noviar.

Sejak 24 Oktober 2024, BPBD DIY telah menetapkan wilayah DIY dalam status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah, yang mencakup potensi bencana seperti longsor, banjir, dan puting beliung. Status ini berlaku hingga 23 November 2024 dan bisa diperpanjang tergantung kondisi dari BMKG.

"Hidrometeorologi basah ini mirip dengan fenomena La Nina, yang dapat meningkatkan curah hujan. Kami perkirakan kondisi ini akan berlangsung hingga Februari 2025," jelas Noviar. **(han)**

KPU DIY Siapkan Fasilitas Inklusif untuk Pemilih Disabilitas

YOGYA, TRIBUN - Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya lebih mudah. Salah satu fokus utama KPU DIY adalah meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih dengan gangguan penglihatan (netra) dan disabilitas lainnya.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY, Sri Surani menjelaskan bahwa KPU telah menyiapkan alat bantu coblos yang akan tersedia di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Alat bantu coblos ini disediakan untuk pemilih net-

ra di semua TPS, agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya secara mandiri," ujar Sri Surani, Jumat (8/11).

Selain itu, KPU DIY juga sedang menyiapkan video tutorial khusus yang akan dibagikan kepada seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di DIY. Video ini bertujuan untuk memandu KPPS dalam membantu pemilih disabilitas, mulai dari yang memiliki gangguan penglihatan, pendengaran, hingga disabilitas lainnya.

"Kami bekerja sama dengan SIGAP untuk membuat video ini, agar KPPS lebih siap dalam membantu pemilih dengan berbagai jenis disabilitas," jelas Sri Surani.

Untuk memberikan keleluasaan kepada pemilih disabilitas, KPU juga mengizinkan pemilih yang datang dengan pendamping untuk tetap membawa pendamping sendiri, asalkan mereka menandatangani formulir pendampingan. "Jika pemilih disabilitas datang tanpa pendamping, mereka akan dibantu oleh KPPS," tambahny.

KPU DIY juga telah melakukan evaluasi terkait pentingnya pengoptimalan data pemilih disabilitas agar terdapat sesuai dengan jenis disabilitasnya. KPU juga telah memperluas kerja sama dengan organisasi disabilitas dalam menyusun tema debat publik yang inklusif. **(han)**



TRIBUN JOGJA/NANDA SAGITA GINTING

Pramuka Saka Wirausaha Angkat Desa Wisata Putat Gunungkidul jadi Inspirasi Inkubasi Bisnis

GUNUNGKIDUL, TRIBUN - Rangkaian kegiatan perkemahan Pramuka Inkubasi Bisnis se-DIY berakhir pada Jumat (8/11), di Kampung Pramuka Putat, Kabupaten Gunungkidul.

Pada kegiatan puncak ini, para Pramuka Saka Wirausaha se-DIY yang berjumlah sekitar 70 peserta akan mengikuti kegiatan workshop sekaligus presentasi ide dan model bisnis untuk mendapatkan pembinaan.

Ketua Pembina Pramuka Saka Wirausaha se-DIY sekaligus Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Hermawan mengatakan, kegiatan ini bersinergi dengan Kalurahan Putat sebagai desa entrepreneur yang dibawahi Dinas Koperasi dan UKM DIY sekaligus desa mandiri budaya.

"Maka dari itu, kami ingin adanya kombinasi akan hal ini. Apa yang menjadi potensi di Desa Putat ini bisa dikulik dan dijadikan inspirasi oleh Pramuka Saka Wirausaha untuk dikembangkan lagi. Serta, bisa mempresentasikan proyek mereka tersebut, untuk nantinya mendapatkan penilaian dari para pendamping," ujarnya di sela kegiatan tersebut.

Dia menambahkan, penilaian yang dimaksud meliputi ide bisnis, rencana usaha, progres, hingga performa. Nantinya, peserta yang mencapai target akan mendapatkan modal pembinaan dan pendampingan, baik kelompok maupun individu.

"Dan, saat ini kategori bisnis yang dijalankan para Pramuka Saka Wirausaha sebagian besar berjalan di bidang kuliner. Akan kami bina, termasuk soal pemasaran bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya. Karena, kami harap 5-10 tahun ke depan para anak-anak ini bisa menjadi entrepreneur yang mandiri dan berdikari," imbuhnya, seraya menyebutnya bahwa kegiatan ini terselenggara

dengan dukungan Dana Keistimewaan (Danais) DIY.

Sementara itu, Majelis Pembimbing Saka Wirausaha, Bio Hadikusuma mengatakan, kegiatan ini merupakan inkubasi bisnis yang dikembangkan dalam program Saka Wirausaha. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan anak pramuka yang memiliki jiwa pengusaha muda.

"Dalam program yang dinamai inkubasi bisnis ini, kami ingin mempercepat pertumbuhan skill wirausahawan dari anak-anak Pramuka ini. Di mana, para peserta akan diajari praktik langsung berbisnis cash by cash dengan cara yang menyenangkan," ungkapny.

Dia mengatakan, hadirnya inkubasi bisnis Saka Wirausaha sekaligus menyiapkan anak muda dalam menghadapi bonus demografi pada 2045 mendatang.

"Sehingga pada 2045 nanti, anak-anak ini akan memasuki usia produktif. Harapannya, mereka tidak lagi menjadi pencari pekerjaan namun membuka lapangan pekerjaan. Sehingga sudah mandiri," paparnya.

Lebih jauh, para peserta Saka Wirausaha akan mendapatkan pendampingan langsung dari instruktur, yang juga merupakan pengusaha maupun anggota Pramuka Saka Wirausaha yang sudah berhasil.

Nantinya, pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan. Di mana, peserta akan diukur kemampuan wirausahanya setiap tahunnya.

"Peserta yang mengikuti kegiatan hari ini, maka tahun depan juga harus ikut inkubasi lagi untuk mengukur levelnya. Untuk tahun pertama mendapatkan modal per kelompok. Dan, tahun kedua sifatnya pembinaan untuk perorangan. Tahun ini, mendapatkan uang pembinaan sebanyak Rp75 juta, itu dibagi sebanyak 6-8 kategori," urainya. **(ndg/ord)**